



Peran Guru Sebagai Garda Utama Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Di Lingkungan Sekolah

Risnu Puja Kesuma¹ Anggun Sakinah² Zein Norika Marsyanda³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, Indonesia. Telepon: (0721) 773847.

Email : risnurisnu72@gmail.com¹, anggunsakinah0@gmail.com²,
zaeinnorikamarsyanda@gmail.com³

Abstract: *This study highlights the strategic role of teachers in integrating anti-corruption values into the world of education. Teachers not only function as transmitters of teaching materials, but also as agents of character formation who instill the values of honesty, responsibility, and integrity. Through a curriculum integrated with anti-corruption values, inspiring learning methods, and a conducive learning environment, teachers have an important role in fostering anti-corruption awareness from an early age. Teachers' exemplary behavior in everyday life and involvement in non-formal activities also strengthen the formation of students' character. Collaboration between schools, families, and communities is a supporting factor in creating a young generation with high integrity. Thus, teachers are at the forefront of efforts to build a nation free from corruption.*

Keywords: *strategy, character education, integrity, and role model.*

Abstrak: Penelitian ini menyoroti peran strategis guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi ajar, tetapi juga sebagai agen pembentukan karakter yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Melalui kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi, metode pembelajaran yang inspiratif, serta lingkungan belajar yang kondusif, guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi sejak dini. Keteladanan guru dalam kehidupan sehari-hari dan keterlibatan dalam kegiatan nonformal turut memperkuat pembentukan karakter siswa. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas tinggi. Dengan demikian, guru menjadi ujung tombak dalam upaya membangun bangsa yang bebas dari korupsi.

Kata kunci: strategi, pendidikan karakter, integritas, dan keteladanan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan pelanggaran hukum yang bisa dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Tindakan ini biasanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, serta pelanggaran terhadap norma dan etika demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Meskipun sering diasosiasikan dengan kemiskinan, anggapan bahwa kondisi ekonomi yang sulit mendorong seseorang untuk

melakukan korupsi tidak sepenuhnya tepat. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa pelaku korupsi berasal dari kalangan yang mapan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata-mata masalah kebutuhan, melainkan juga persoalan moral dan integritas. Apalagi, korupsi kerap dilakukan secara tersembunyi, terstruktur, dan sistematis, membuat pelakunya merasa aman dan tidak merasa bersalah. Padahal, dampaknya sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan¹.

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah melalui pendidikan antikorupsi yang dirancang untuk membangun budaya integritas sejak dini. Pendidikan dalam arti luas merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri. Hal ini mencakup penguatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya dan masyarakat. Agar manusia menjadi pribadi yang sempurna jasmani dan rohani, maka pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dapat menyempurnakan lahir dan batin. Maka program pendidikan dianggap gagal apabila menghasilkan individu yang lemah, korup, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak mampu berperilaku mandiri.

Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manajemen pendidikan atau filosofi yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Akhir-akhir ini kita mengamati bahwa kritik masyarakat seringkali terfokus pada berbagai isu pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia dianggap tidak melahirkan orang-orang yang berpendidikan, beretika, dan berperikemanusiaan. Karena kita mencermati masih ada berbagai bentuk kekerasan, anarki, korupsi, perusakan, dan tindakan asusila saat ini sedang mengguncangkan sendi-sendi bangsa.²

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap individu, khususnya generasi muda. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang akan memimpin bangsa di masa depan. Melalui pendidikan, mereka dapat memahami dampak destruktif dari korupsi dan pentingnya menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika. Upaya ini bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat agar mereka mampu menolak godaan korupsi di berbagai level kehidupan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan antikorupsi telah mulai diterapkan melalui kurikulum di beberapa jenjang pendidikan. Pemerintah, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam mata pelajaran tertentu. Meskipun langkah ini patut diapresiasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi pendidik, minimnya bahan ajar yang relevan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan antikorupsi.³

¹ Zainudin, Hasan. 2025. *pendidikan antikorupsi*. Universitas Bandar Lampung: Lampung

² Transparency International. (2023) *corruption perceptions index 2023*

³ Komisi pemberantasan korupsi (KPK). *Pendidikan antikorupsi*. 25 April 2025

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Tidak hanya melibatkan sekolah, tetapi juga keluarga, komunitas, dan media sebagai agen pembentuk nilai. Sebagai contoh, pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dapat menjadi strategi untuk mengajarkan integritas dengan lebih dekat kepada konteks budaya masyarakat. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga perlu memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau generasi muda yang hidup dalam era informasi⁴.

Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di era Revolusi Industri 4.0. Menurut Zainudin Hasan (2025), integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum lembaga pendidikan sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pemanfaatan media digital seperti platform e-learning menjadi sarana strategis dalam menyampaikan materi antikorupsi secara lebih efektif dan luas. Lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada siswa. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta budaya antikorupsi yang kuat, tidak hanya dalam lingkungan pendidikan, tetapi juga di masyarakat luas. Buku *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0* karya Zainudin Hasan ini memberikan panduan penting tentang strategi implementasi pendidikan antikorupsi, sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya⁵.

TUJUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan individu sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mengembangkan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, membentuk karakter, dan meningkatkan mutu pendidikan. Perihal ini berkaitan dengan upaya penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia guna mencanangkan kesadaran anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Telah disepakati bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk memperkuat karakter dan perilaku yang mendukung perkembangan peradaban bangsa.⁶

Pendidikan Antikorupsi, disingkat PAK, merupakan upaya pembelajaran yang bertujuan memperkuat integritas dalam lingkungan pendidikan guna membentuk karakter

⁴ Siregar, E. (2021). *strategi Pendidikan antikorupsi berbasis nilai lokal di era digital*. *jurnal Pendidikan karakter*, 11(2), 230-241.

⁵ Zainudin Hasan. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2010). *Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.

dan budaya anti korupsi. Ciri-ciri karakter anti korupsi mencakup sifat jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan rajin. Perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk berperan secara strategis dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, terutama dalam membentuk budaya integritas di kalangan mahasiswa. Dengan mendorong kultur akademisi, diharapkan mahasiswa akan memiliki bekal sosial untuk membiasakan diri berperilaku anti-korupsi.⁷

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk integritas dan karakter generasi penerus bangsa, terutama dalam konteks pencegahan korupsi. Hasan, Wijaya, Yansah, Setiawan, dan Yuda (2024) menekankan bahwa penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus dimulai sejak dini melalui pendidikan formal. Pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum sekolah merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, proses ini tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan kurikulum, serta minimnya pemahaman dan komitmen dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif, pendidikan antikorupsi dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi masa depan yang berintegritas dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa⁸

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, maka permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa peran guru dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran formal dan nonformal di sekolah?
2. Bagaimana peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah?

⁷ Korupsi pemberantasan korupsi.(2020).*panduan Pendidikan antikorupsi diperguruan tinggi*. Jakarta:KPK.

⁸ Zainudin Hasan, Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). (Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 15.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan, yaitu melalui pendekatan Terhadap narasumber, adapun beberapa cara yaitu bersumber pada buku ,catatan dan hasil penelitian yang kami lakukan,yang berkaitan dengan Peran guru sebagai garda utama penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, selain itu penelitian yang kami lakukan membahas juga bagaimana cara penerapan nya di kurikulum Pendidikan anti korupsi.⁹

PEMBAHASAN KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Peran Guru Dalam Membangun Kesadaran Anti Korupsi Melalui Kegiatan Pembelajaran Formal Dan Non Formal Di Sekolah

Pendidikan antikorupsi sejak dini di lembaga pendidikan merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa, diharapkan dapat membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.¹⁰ Korupsi merupakan salah satu yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga harus dimulai dari Pendidikan khusus sejak usia dini. Dalam konteks ini, guru memiliki peran sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki integritas dan kesadaran anti korupsi. Peran ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran baik formal maupun non formal di lingkungan sekolah¹¹

Dalam pembelajaran formal, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus agen perubahan (agent of change) yang dapat di tanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik secara terstruktur dan sistematis. nilai-nilai tersebut seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, kerja keras, dan kepedulian dapat di terapkan dalam materi pembelajaran yang ada. Sebagai contoh, dalam Pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), guru dapat menyisipkan materi mengenai pentingnya menjaga kejujuran sebagai bagian dari perilaku warga negara yang baik.

Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi peran (role playing). metode ini memberikan bagi siswa untuk memahami secara lebih nyata Bagaimana korupsi bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa sikap anti korupsi penting di tanamkan sejak dini.¹²

⁹ Suyanto,s.(2019).*peran guru dalam Pendidikan karakter*.yogyakarta:Graha ilmu.

¹⁰ Zainudin Hasan, & Saputri, W. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Journal of Social Science Research*, 4(6).

¹¹ UNESCO. (2005). *Guidelines for Strengthening Education Against Corruption*

¹² Zuchi,D.(2011).*pendidikan karakter:konsep dasar dan implementasi di sekolah*.yogyakarta:UNY press.

Contohnya, diskusi tentang perilaku mencontek sebagai bentuk kecurangan kecil yang bisa berkembang yang bisa menjadi kebiasaan buruk di masa depan. Diluar kegiatan intrakurikuler, guru juga memiliki peran penting dalam pembelajaran nonformal, seperti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, kegiatan sosial, dan keagamaan. Melalui kegiatan nonformal, guru dapat membentuk lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran nilai-nilai antikorupsi melalui pembiasaan, pembimbingan, dan keteladanan, misalnya, dalam kegiatan pramuka atau OSIS, guru sebagai Pembina atau pembimbing dapat menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan yang bersih. dalam kegiatan keagamaan, guru bisa menyisipkan pesan-pesan moral yang berkaitan tentang integritas dan penolakan terhadap segala bentuk penipuan atau keadilan. kampanye sekolah seperti “HARI ANTIKORUPSI”, lomba membuat poster atau pidato bertema anti korupsi, juga menjadi wadah edukatif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara kreatif dan menyenangkan¹³.

Peran guru tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga sebagai panutan (role model) dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan lebih mudah meniru perilaku guru yang menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan adil dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan guru dapat melemahkan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, guru yang adil dalam memberikan penilaian, tidak menerima titipan nilai, serta memperlakukan semua siswa secara setara tanpa diskriminasi, akan membentuk kepercayaan siswa terhadap pentingnya integritas. Keteladanan ini jauh lebih efektif daripada ceramah atau teori semata¹⁴.

Bagaimana Peran Guru Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Antikorupsi Ke Dalam Kegiatan Pembelajaran Sekolah

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga melalui jalur pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada peserta didik sejak dini. Dalam konteks ini, guru memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum secara eksplisit maupun implisit. Integrasi eksplisit dilakukan dengan menyisipkan tema antikorupsi dalam materi pelajaran. Misalnya, dalam mata pelajaran PPKn, siswa dapat mempelajari tentang nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Integrasi implisit dapat dilakukan melalui pendekatan nilai dalam proses belajar mengajar, seperti membangun budaya jujur dalam

¹³ Prabowo, A. (2018) *pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 24(3), 112-121

¹⁴ Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

ujian, membiasakan siswa untuk tidak mencontek, serta menghargai kerja keras sendiri dalam menyelesaikan tugas.¹⁵

Penelitian mengenai peran guru sebagai garda utama dalam penerapan Pendidikan antikorupsi di sekolah menyimpulkan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif pada siswa, termasuk sikap anti korupsi. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Pendidikan anti korupsi merupakan pendekatan secara strategis yang sangat penting dalam membentuk karakter pelajar anti korupsi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada memberikan pengetahuan dan penerapan kepada pelajar anti korupsi.

Tetapi juga menekankan pelajar dalam pembentukan sikap dan perilaku yang berintegritas. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Guru diharapkan menjadi role model bagi siswa dalam hal perilaku anti korupsi. Mereka perlu menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Pendidikan anti korupsi di sekolah sangat penting karena dapat membentuk Penerapan pendidikan anti korupsi tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi juga melibatkan peran aktif dari kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat.¹⁶

Contoh Penerapan:

- a) Kantin Kejujuran: Siswa dapat belajar tentang kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan.
- b) Pembelajaran PKN: Kurikulum PKN dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi.
- c) Kegiatan Ekstrakurikuler: Kegiatan seperti debat anti korupsi dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang korupsi dan cara mencegahnya.
- d) Pembelajaran yang Menarik: Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk membuat pembelajaran anti korupsi lebih menyenangkan.

Tantangan dan strategi implementasi Pendidikan anti korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui jalur pendidikan. Sekolah menjadi salah satu wadah strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, dan di sinilah peran guru menjadi sangat vital. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, panutan, serta agen perubahan dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Namun, dalam menjalankan peran ini, guru menghadapi berbagai tantangan yang tidak

¹⁵ **Suyatno, et al. (2019).** "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Antikorupsi." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 9 No. 2.

¹⁶ **Wibowo, A. (2017).** Peran Guru dalam Membangun Karakter Siswa Melalui Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 123–134.

ringan. Di sisi lain, terdapat pula berbagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran guru sebagai garda terdepan pendidikan antikorupsi¹⁷.

A. Tantangan yang Dihadapi Guru:

1. Kurangnya Pelatihan Khusus

Banyak guru belum mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang cukup mengenai pendidikan antikorupsi. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam proses pembelajaran secara efektif.

2. Keterbatasan Waktu dan Kurikulum yang Padat

Materi pelajaran yang padat membuat guru kesulitan menyisipkan pendidikan karakter secara mendalam, termasuk nilai-nilai antikorupsi.

3. Minimnya Dukungan Lingkungan

Lingkungan sekolah atau masyarakat yang belum sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas dapat menghambat internalisasi nilai-nilai antikorupsi di kalangan siswa.

4. Keteladanan yang Kurang Konsisten

Pendidikan karakter, termasuk antikorupsi, akan sulit tercapai jika tidak didukung oleh keteladanan nyata dari guru dan seluruh warga sekolah.

5. Terbatasnya Media dan Sumber Ajar

Ketersediaan bahan ajar yang menarik dan relevan tentang pendidikan antikorupsi masih terbatas, sehingga guru perlu kreatif dalam menyusun materi pembelajaran.¹⁸

B. Strategi Penguatan Peran Guru:

1. Integrasi Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum

Guru dapat mengaitkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan ke dalam materi pelajaran, baik secara langsung maupun melalui studi kasus, cerita inspiratif, atau diskusi kelompok.

2. Metode Pembelajaran Aktif dan Berbasis Karakter

Menggunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti debat, simulasi, atau permainan edukatif, dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya hidup tanpa korupsi.

3. Memberikan Keteladanan

¹⁷ Budimansyah, D. & Suryadi, K. (2008). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Rizqi Press.

¹⁸ Fitriyah, L., & Mulyasa, E. (2021). "Tantangan Guru dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(1), 50–62.

Guru harus menjadi contoh nyata dalam bersikap dan bertindak. Konsistensi dalam kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab akan menjadi pembelajaran yang kuat bagi siswa.

4. Membangun Budaya Sekolah yang Bersih dan Transparan

Sekolah perlu menciptakan sistem yang mendukung nilai-nilai antikorupsi, seperti pemilihan OSIS yang jujur, pengelolaan keuangan yang terbuka, dan aturan yang adil serta konsisten.

5. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat

Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif jika dilakukan secara terpadu antara sekolah, keluarga, dan lingkungan. Guru dapat menjalin komunikasi aktif dengan orang tua dan komunitas sekitar untuk memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Media Edukasi

Guru dapat memanfaatkan video, artikel, infografis, atau media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi yang relevan dan menarik bagi siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Strategi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama menjadi fondasi penting dalam membangun karakter yang tangguh di tengah tantangan zaman. Pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran menjadi kunci untuk menanamkan kesadaran antikorupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Di era digital saat ini, pendidikan karakter dihadapkan pada tantangan baru, seperti derasnya arus informasi dan isu-isu etika digital.

Oleh karena itu, integrasi nilai antikorupsi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Modul pembelajaran yang kontekstual serta pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk korupsi di lingkungan sekitar perlu terus diperkuat. Penting pula adanya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan karakter dan kesadaran antikorupsi. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral, berintegritas, dan siap menjadi garda terdepan dalam menciptakan bangsa yang bersih dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. & Suryadi, K. (2008). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Rizqi Press.
- Fitriyah, L., & Mulyasa, E. (2021). "Tantangan Guru dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(1), 50–62.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2010). *Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud
- Korupsi pemberantasan korupsi.(2020).*panduan Pendidikan antikorupsi diperguruan tinggi*. Jakarta:KPK.
- Komisi pemberantasan korupsi (KPK).*Pendidikan antikorupsi*.25 april 2025
- Prabowo,A.(2018)*pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.jurnal pendidikan dan kebudayaan,24(3),112-121*
- Siregar,E.(2021) *strategi Pendidikan antikorupsi berbasis nilai lokal di era digital. jurnal Pendidikan karakter,11(2),230-241.*
- Suyatno, et al. (2019). "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Antikorupsi." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 9 No. 2.
- Suyanto,s.(2019).*peran guru dalam Pendidikan karakter*.yogyakarta:Graha ilmu.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Transparency international.(2023) *corruption perceptions index 2023*
- Uesco. (2005). *Guidelines for Strengthening Education Against Corruption*
- Wibowo,A. (2017).*Peran Guru dalam Membangun Karakter Siswa Melalui Pendidikan Antikorupsi. Jurnal Pendidikan Karakter, 7(2), 123–134.*
- Zuchi,D.(2011).*pendidikan karakter:konsep dasar dan implementasi di sekolah*.yogyakarta:UNY press.
- Zainudin Hasan..2025. *prndidikan antikorupsi. Universitas Bandar Lampung:Lampung*
- Zainudin Hasan.(2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.*
- Zainudin Hasan., & Saputri, W. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Journal of Social Science Research*, 4(6).
- Zainudin Hasan, Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). (Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 15.